
Jenis Berkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.Maret-2020/5
Judul	: Untuk Penanganan Covid 19	Tanggal	: 24 Maret 2020
Sub Judul	: Pemprov Riau Bisa Realokasi Belanja Rp. 353,6 M	Tahun	: 2020
		Penulis	: *FITRA RIAU*

Untuk Penanganan COVID 19
Pemprov Riau Bisa Realokasi Belanja Rp. 356,1 M

FITRA RIAU- Portal data corona.riau.go.id menginformasikan per 19 per 24 Maret 2020 penyebaran COVID 19 telah berkembang luas keseluruh daerah di provinsi Riau. Berdasarkan data tersebut menunjukkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 1823 orang, Pasien Dalam Pengawasan berjumlah 55 orang dan positif infeksi corona 1 orang dan sedang dalam proses perawatan di rumah sakit. Upaya serius pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menyikapi penyebaran pandemi ini dengan menyusun program dan kebijakan yang tepat serta didukung dengan anggaran yang memadai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Pemerintah Provinsi Riau saat tengah dalam proses penyusunan anggaran untuk penanganan COVID 19. Menurut informasi tersebut, pemerintah mencadangkan Rp. 80 Milyar yang sedang dalam proses pembahasan. Belum diketahui program dan kegiatan apa yang akan dilakukan dengan anggaran tersebut.

Penyediaan anggaran COVID 19 melalui realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan telah ditruksi oleh Presiden melalui Inpres nomor 4 tahun 2020. Peraturan Menteri dalam Negeri 20 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 19 tahun 2020 yang secara teknis mengatur mekanisme realokasi dan sumber-sumber anggaran yang berpotensi dapat dialihkan untuk membiayai program dan kegiatan penanganan COVID 19.

Rp. 356,1 M Bisa Direalokasi

Melalui telaah dokumen APBD Provinsi Riau tahun 2020 yang dilakukan FITRA RIAU, terdapat **Rp. 356,1 Milyar** anggaran yang bisa direalokasikan untuk penanganan wabah ini. Anggaran tersebut sebagian berasal dari kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang tidak prioritas utama dan dapat ditunda. Sebagian lagi berasal dari pengurangan anggaran operasional pemerintah daerah dan belanja rutin yang tidak wajar.

Secara detail realokasi anggaran tersebut terdiri dari, realokasi toral (100%) dari anggaran pembelian kendaraan dinas pimpinan DPRD sebesar Rp. 10,4 Milyar, selain tidak prioritas anggaran kendaraan dinas ini bertentangan dengan peraturan perundangan. Selanjutnya pembangunan gedung Kantor termasuk untuk pembangunan gedung Korem Rp. 87,8 Milyar, kegiatan dalam pembangunan gedung kantor ini seperti pembangunan gedung korem Rp. 50 M, pembangunan gedung kantor lainnya yang tidak prioritas.

Untuk anggaran lainnya yang dapat direalokasi 100% yaitu Anggaran Perjalanan Dinas keluar negeri Rp. 16,5 Milyar. Kegiatan konsultasi dan biaya pengurusan kunjungan ke LN bagi DPRD sebesar Rp. 1,3 Milyar. Selain itu anggaran tunjangan perumahan khusus bagi pimpinan DPRD sebesar Rp. 1 Milyar, anggaran ini bertentangan dengan ketentuan karena pimpinan DPRD seluruhnya disediakan rumah dinas khusus oleh pemerintah daerah.

Rencana belanja lainnya yang harus di realokasi yaitu belanja operasional dengan pengurangan 30%. Seperti anggaran perjalanan Dinas dalam dan luar daerah sebesar Rp. 107 Milyar. Pengurangan anggaran 30% dari program dan kegiatan rutin aparatur sebesar Rp. 131,7 Milyar yang dipergunakan untuk administrasi perkantoran, peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana apatur.

Tabel: Skenario Realokasi Anggaran Provinsi Riau untuk COVID 19

Nama Kegiatan	Potensi Realokasi	Total Anggaran Tersedian di APBD	Realokasi	POS Anggaran
Pembelian mobil dinas DPRD Riau	100%	10.421.310.000	10.421.310.000	Sekretariat DPRD
Pembangunan gedung kantor termasuk Kantor Korem	100%	87.873.692.800	87.873.692.800	PUPR
Perjalanan Dinas luar negeri	100%	16.597.786.000	16.597.786.000	DPRD, Setda, pariwisata, dispora, Bappeda, BKD
Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	30%	356.802.017.394	107.040.605.218	Semua OPD
Belanja Rutin (Administrasi perkantoran, penguatan kapasitas, sarana prasarana aparatur)	30%	439.156.450.266	131.746.935.080	Semua OPD
Konsultasi dan pengurusan kunjungan luar negeri pimpinan dan anggota DPRD Riau	100%	1.398.560.000	1.398.560.000	DPRD Riau
Tunjangan Perumahan Khusus empat Pimpinan DPRD Riau	100%	1.104.000.000	1.104.000.000	DPRD Riau
Total		913.353.816.460	356.182.889.098	

Gubernur Riau harus berani melakukan realokasikan anggaran-anggaran tersebut untuk dicanangkan sebagai anggaran COVID 19. Penanganan cepat dengan program-program yang terukur yang dukungan pendanaan yang memadai sangat penting. Program penanganan covid 19 diarahkan untuk tiga hal yaitu memaksimalkan pencegahan, penanganan dan yang tidak kalah penting adalah pengendalian dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang rentan.

Potensi Ketersediaan Anggaran

Menurut FITRA RIAU, ketersediaan anggaran di kas daerah masih sangat memungkinkan bagi Riau untuk melakukan penanganan cepat. Dengan syarat anggaran yang tersedia difokuskan pada penanganan COVID 19 selain belanja rutin berupa gaji dan tunjangan untuk beberapa bulan kedepan.

Melalui saluran informasi emonev.riau.go, realiasi keuangan pemerintah daerah per 24 Maret 2020 sebesar Rp. 458 Miliar atau 4,4% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 10.2 Triliun. Jika melihat akumulasi realisasi tranfer pusat ke pemerintah provinsi Riau hingga Februari 2020 lalu, telah mencapai Rp. 999,7 Milyar. Oleh karena itu, potensial dana tersebut hingga hari ini adalah Rp. 541 Milyar. Jumlah tersebut belum termasuk dari realisas penerimaan pendapatan dari PAD.

Gerak cepat sangat diperlukan untuk berupaya menyelamatkan masyarakat dari COVID 19. Gubernur harus berani melaksanakan kebijakan – kebijakan tepat dan terukur agar laju penyebaran corona virus dapat teratasi dengan baik.

.....
 Kontak Person:

Triono Hadi : 085376368128
 Taufik : 085353430444
 Tarmizi : 085278175515